

LAPORAN KEUANGAN

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta (692893)

30 September 2025

**Jl. Adi Sucipto No. 8 Colomadu
SURAKARTA**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung-jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Surakarta, Oktober 2025

Kepala Kantor Imigrasi,



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	10
A. Penjelasan Umum	10
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	23
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	25
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	29
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	33
F. Pengungkapan Penting Lainnya	36
VI. Lampiran	

KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA

JL. ADI SUCIPTO NO. 8 COLOMADU
TELEPON (0271) 718479, FAXIMILE (0271)719887

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Triwulan III Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Surakarta, Oktober 2025

Kepala Kantor Imigrasi,



Nomor 006011992031001

Laporan Keuangan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta Triwulan III TA 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 September 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada Triwulan III TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp42.671.168.054,-

Realisasi Belanja Negara pada Triwulan III TA 2025 adalah sebesar Rp9.406.603.838,- atau mencapai 69,94% dari alokasi anggaran sebesar Rp13.450.071.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 September 2025. Nilai Aset per 30 September 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp32.930.673.569,- yang terdiri dari aset lancar Rp420.480.953,-, aset tetap Rp32.510.192.616,-, serta aset lainnya sebesar Rp0,-. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp808.990.810,- dan Rp32.121.682.759,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 September 2025 adalah sebesar

Rp44.189.584.943,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp10.267.119.260,- sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp33.922.465.683,-.

Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp21.335.222,- dan Rp 0,- sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp33.943.800.905,-.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp33.943.800.905,- ditambah Defisit-LO sebesar Rp0,- kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,- dan dikurangi Transaksi Antar Entitas sebesar Rp1.822.118.146,- sehingga Ekuitas pada tanggal 30 September 2025 adalah senilai Rp32.121.682.756,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 September 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 September 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN 137
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI 03
SATUAN KERJA : KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA 692893

Tgl Data : 19/10/25 7:30 PM
Tgl Cetak : 20/10/25 8:44 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	23,386,450,000	42,671,168,054	19,284,718,054	182.46	0	0	0	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	23,386,450,000	42,671,168,054	19,284,718,054	182.46	0	0	0	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	23,386,450,000	42,671,168,054	19,284,718,054	182.46	0	0	0	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	13,450,071,000	9,406,603,838	(4,043,467,162)	69.94	0	0	0	0
1. Belanja Pegawai	6,613,588,000	6,139,687,413	(473,900,587)	92.83	0	0	0	0
2. Belanja Barang	6,409,906,000	3,266,916,425	(3,142,989,575)	50.97	0	0	0	0
3. Belanja Modal	426,577,000	0	(426,577,000)	0.00	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN 137
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI 03
SATUAN KERJA : KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA 692893

Tgl Data : 19/10/25 7:30 PM
Tgl Cetak : 20/10/25 8:44 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	13,450,071,000	9,406,603,838	(4,043,467,162)	69.94	0	0	0	0
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Karanganyar, 20 Oktober 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KEPALA KANTOR



NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 SEPTEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (137) KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : (692893) KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA

Tgl Data : 19/10/25 7:30 PM
Tgl Cetak : 20/10/25 8:45 AM
Halaman : 1
lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	73,100,000	0	73,100,000	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	3,035,151	0	3,035,151	0.00
Piutang Bukan Pajak	1,684,320	0	1,684,320	0.00
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	1,684,320	0	1,684,320	0.00
Persediaan	342,661,482	0	342,661,482	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	420,480,953	0	420,480,953	
ASET TETAP				
Tanah	20,274,837,000	0	20,274,837,000	0.00
Peralatan dan Mesin	20,294,301,373	0	20,294,301,373	0.00
Gedung dan Bangunan	9,406,306,216	0	9,406,306,216	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(17,465,251,973)	0	(17,465,251,973)	0.00
JUMLAH ASET TETAP	32,510,192,616	0	32,510,192,616	
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	38,555,257	0	38,555,257	0.00
Aset Lain-lain	17,375,620	0	17,375,620	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(55,930,877)	0	(55,930,877)	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	32,930,673,569	0	32,930,673,569	
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	680,717,878	0	680,717,878	0.00
Utang Yang Belum Ditagihkan	55,172,932	0	55,172,932	0.00
Uang Muka dari KPPN	73,100,000	0	73,100,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	808,990,810	0	808,990,810	
JUMLAH KEWAJIBAN	808,990,810	0	808,990,810	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	32,121,682,759	0	32,121,682,759	0.00
JUMLAH EKUITAS	32,121,682,759	0	32,121,682,759	
JUMLAH EKUITAS	32,121,682,759	0	32,121,682,759	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	32,930,673,569	0	32,930,673,569	

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 SEPTEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (137) KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : (692893) KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA

Tgl Data : 19/10/25 7:30 PM
Tgl Cetak : 20/10/25 8:45 AM
Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif_poc

Keterangan :
FINAL



Karaganyar, 20 Oktober 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KEPALA KANTOR

50 RM.SOS., M.M.
0706011992031001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 SEPTEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (137) KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
ESELON I : (03) DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : (692893) KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA

Tgl Data : 19/10/25 7:30 PM
Tgl Cetak : 20/10/25 8:45 AM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	44,189,584,943	0	44,189,584,943	
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	44,189,584,943	0	44,189,584,943	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	44,189,584,943	0	44,189,584,943	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	6,669,427,700	0	6,669,427,700	
Beban Persediaan	101,545,805	0	101,545,805	
Beban Barang dan Jasa	2,077,372,530	0	2,077,372,530	
Beban Pemeliharaan	396,247,248	0	396,247,248	
Beban Perjalanan Dinas	1,022,525,977	0	1,022,525,977	
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (137) KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
ESELON I : (03) DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : (692893) KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA

Tgl Data : 19/10/25 7:30 PM

Tgl Cetak : 20/10/25 8:45 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	10,267,119,260	0	10,267,119,260	
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	33,922,465,683	0	33,922,465,683	
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	3,544,500	0	3,544,500	
Pendapatan Pelepasan Aset	3,544,500	0	3,544,500	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	17,790,722	0	17,790,722	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	17,790,722	0	17,790,722	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	21,335,222	0	21,335,222	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	33,943,800,905	0	33,943,800,905	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	33,943,800,905	0	33,943,800,905	

Keterangan :
FINAL

Karanganyar, 20 Oktober 2025
Penanggung Jawab UAKPA



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (137) KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0300) JAWA TENGAH

SATUAN KERJA : (692893) KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA

Tgl Data : 20/10/25 12:30 AM

Tgl Cetak : 20/10/25 8:45 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
SURPLUS/DEFISIT-LO	33,943,800,905	0	33,943,800,905	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(1,822,118,146)	0	(1,822,118,146)	0
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	32,121,682,759	0	32,121,682,759	0
EKUITAS AKHIR	32,121,682,759	0	32,121,682,759	0

Keterangan :

FINAL

Karanganyar, 20 Oktober 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KEPALA KANTOR



BISRI, S.SOS.M.M.

NIP. 197006011992031001

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta

Profil Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.071/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Entitas berkedudukan di Jalan Adi Sucipto No. 8 Colomadu.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta berkomitmen dengan visi *“mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.”* Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 Triwulan III ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk

penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis

Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang

digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta adalah sebagai berikut :

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak

mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening

Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan

penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset

Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir Triwulan III tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap Triwulan III selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara

berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas

dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2018 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi

Pendapatan

Rp42.671.168.054,-

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 adalah sebesar Rp42.671.168.054,-. Pendapatan terdiri dari pendapatan sewa, tanah, gedung dan bangunan, pendapatan paspor, pendapatan Visa, pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (re-entry permit), pendapatan pelayanan Keimigrasian lainnya.

Realisasi

Belanja Negara

Rp9.406.603.838,-

B.2 Belanja

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 adalah sebesar Rp9.406.603.838,- atau 69,94% dari anggaran belanja sebesar Rp13.450.071.000,-.

Belanja

Pegawai

Rp6.139.687.413,-

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai 30 September 2025 dan 30 September 2024 adalah masing-masing sebesar Rp6.139.687.413,- dan Rp0,-. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Belanja Barang

Rp3.266.916.425,-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang 30 September 2025 dan 30 September 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.266.916.425,- dan Rp0,-.

Belanja Modal **B.5 Belanja Modal**

Rp0,-

Realisasi Belanja Modal 30 September 2025 dan 30 September 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp73.100.000,-*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp73.100.000,- dan Rp0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

*Kas Lainnya
dan Setara
Kas
Rp3.035.151,-*

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 September 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp3.035.151,- dan Rp0,-. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

C.3 Uang Muka Belanja (Prepayment)

*Uang Muka
Belanja
(Prepayment)
Rp0,-*

Saldo Uang Muka Belanja (Prepayment) per tanggal 30 September 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

C.4 Piutang Bukan Pajak

*Piutang Bukan
Pajak
Rp1.684.320,-*

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 30 September 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp1.684.320,- dan Rp0,-. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

C.5 Persediaan

*Persediaan
Rp342.661.482,-*

Nilai Persediaan per 30 September 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp342.661.482,- dan Rp0,-.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

C.6 Persediaan yang Belum Diregister

*Persediaan yang
belum di register
Rp0,-*

Saldo Persediaan yang belum di register per tanggal 30 September 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

C.7 Tanah

*Tanah
Rp20.274.837.
000,-*

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta per 30 September 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp20.274.837.000,- dan Rp0,-.

*Peralatan dan
Mesin
Rp20.294.301.
373,-*

C.8 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 September 2025 dan 2024 adalah Rp20.294.301.373,- dan Rp0,-.

*Gedung dan
Bangunan
Rp9.406.306.2
16,-*

C.9 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 September 2025 dan 2024 adalah Rp9.406.306.216,- dan Rp0,-.

Akumulasi

Penyusutan

Aset Tetap

Rp17.465.251.973,-

C.10 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 September 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp17.465.251.973,- dan Rp0,-. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Aset Tak

Berwujud

Rp38.555.257,-

C.11 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 30 September 2025 dan 2024 adalah Rp38.555.257,- dan Rp0,-. Aset Tak Berwujud pada lingkup Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Dana yang

Dibatasi

Penggunaannya

Rp0,-

C.12 Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 30 September 2025 dan 2024 adalah Rp0,- dan Rp0,-.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu.

Aset Lain-Lain
Rp17.375.620,
-

C.13 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 September 2025 dan 2024 adalah Rp17.375.620,- dan Rp0,-. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

Akumulasi
Penyusutan
dan Amortisasi
Aset Lainnya
Rp55.930.870,
-

C.14 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 September 2025 dan 2024 adalah Rp55.930.870,- dan Rp0,-. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp680.717.87
8,-

C.10 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 September 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp680.717.878,- dan Rp0,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

<i>Utang yang Belum Ditagihkan Rp55.172.932, -</i>	C.11 Utang yang Belum Ditagihkan Nilai Utang yang Belum Ditagihkan per 30 September 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp55.172.932,- dan Rp0,-. Utang yang Belum Ditagihkan merupakan kewajiban yang masih harus dibayar karena adanya BAST dari pihak ketiga.
<i>Uang Muka dari KPPN Rp73.100.000, -</i>	C.24 Uang Muka dari KPPN Saldo Uang Muka dari KPPN per per 30 September 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp73.100.000,-dan Rp0,-.Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.
<i>Ekuitas Rp32.121.682.759,-</i>	C.12 Ekuitas Ekuitas per 30 September 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar defisit Rp32.121.682.759,- dan Rp0,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan
PNBP
Rp44.189.584.
943,-* **D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**
Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 dan 30 September 2024 adalah sebesar Rp44.189.584.943,- dan Rp0,-

*Beban
Pegawai
Rp6.669.427.7
00,-* **D.2 Beban Pegawai**
Jumlah Beban Pegawai pada 30 September 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp6.669.427.700,- dan Rp0,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Beban
Persediaan
Rp101.545.80
5,-* **D.3 Beban Persediaan**
Jumlah Beban Persediaan pada 30 September 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp101.545.805,- dan Rp0,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

*Beban Barang
dan Jasa
Rp2.077.372.530,
-* **D.4 Beban Barang dan Jasa**
Jumlah Beban Barang dan Jasa pada 30 September 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar

Rp2.077.372.530,- dan Rp0,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Beban

D.5 Beban Pemeliharaan

Pemeliharaan

Rp396.247.248,-

Beban Pemeliharaan pada 30 September 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp396.247.248,- dan Rp0,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Beban

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Perjalanan

Dinas

Rp1.022.525.977,

-

Beban Perjalanan Dinas pada 30 September 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.022.525.977,- dan Rp0,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

*Beban Barang
untuk*

Diserahkan

kepada

Masyarakat

Rp0,-

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0-

.

*Beban
Bantuan
Sosial
Rp0,-*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

*Beban
Penyusutan
dan Amortisasi
Rp0,-*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 September 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp0,-*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp21.335.222,-*

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Jumlah Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 dan 2024 adalah Rp21.335.222,- dan Rp0,-

*Pos Luar Biasa
Rp 0,-*

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 dan 2024 adalah Rp 0,-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

<i>Ekuitas Awal</i> <i>Rp33.943.800.905,-</i>	E.1 Ekuitas Awal Nilai ekuitas pada tanggal 30 September 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp33.943.800.905,- dan Rp0,-.
<i>Surplus/ Defisit LO</i> <i>Rp0,-</i>	E.2 Surplus (Defisit) LO Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.
<i>Penyesuaian Nilai Aset</i> <i>Rp0,-</i>	E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp 0,- dan Rp0,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.
<i>Koreksi Nilai Persediaan</i> <i>Rp0,-</i>	E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,-.
<i>Selisih Revaluasi Aset Tetap</i>	E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap.

Rp0,- Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-.

*KoreksiAset
Tetap Non
Revaluasi
Rp0,-*

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,- Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Koreksi Lain-
Lain
Rp0,-*

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-

*Transaksi
Antar Entitas
Rp1.822.118.14
6,-*

E.4Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar defisit Rp1.822.118.146,- dan Rp0,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 September 2025, DDEL sebesar Rp42.671.168.054,-sedangkan DKEL sebesar Rp9.406.603.838,-.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 September 2025 sebesar Rp31.442.446.070,-

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 September 2025 sebesar Rp0,-

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 September 2025 sebesar Rp 0,-

.

Ekuitas Akhir

E.5 Ekuitas Akhir

*Rp32.121.682.
759,-*

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 September 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp32.121.682.759,- dan Rp0,-.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

F.2 Pengungkapan Lain-Lain

Tidak ada pengungkapan lain-lain.

F.3 Temuan dan Tindak Lanjut Inspektorat/BPK

Tidak ada temuan dan tindak lanjut Inspektorat/BPK

F.4 Rekening Pemerintah

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta memiliki rekening atas nama BPG 028 IMIGRASI SURAKARTA pada Bank mandiri dengan Nomor Rekening : 8100124089441000

Lampiran

INFORMASI KEUANGAN TERTENTU DAN INFORMASI PENTING LAINNYA

A. Informasi Keuangan Tertentu

1. Informasi Pagu dan Realisasi Anggaran s.d. 30 September 2025

a. Informasi Realisasi Belanja dan Estimasi Realisasi

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi s.d 30-Sep	Sisa Pagu s.d. 30-Sep-2025	Rencana Realisasi Triwulan IV	Estimasi Total Realisasi	Estimasi Pagu Tidak Terealisasi
A	B	C	D	E	F (C + E)	G (B – F)
51	6.613.588.000	6.139.687.413	473.900.587	473.000.000	6.612.687.413	900.587
52	6.409.906.000	3.266.916.425	3.142.989.575	3.142.000.000	6.408.916.425	989.575
53	426.577.000	0	426.577.000	426.577.000	426.000.000	577.000
57						
Total	13.450.071.000	9.406.603.838	4.043.467.162	4.041.577.000	13.447.603.838	2.467.162

Sampai dengan triwulan III tahun 2025, realisasi belanja barang/modal/bansos sebesar Rp9.406.603.838,-

Atas sisa pagu yang belum terealisasi sampai dengan triwulan III tahun 2025, direncanakan akan direalisasikan pada triwulan IV tahun 2025 sebesar Rp4.041.577.000,-.

Dengan demikian, diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2025 total realisasi adalah sebesar Rp13.447.603.838,- dan perkiraan pagu yang tidak terealisasi adalah sebesar Rp2.467.162,-

b. Informasi Pagu Minus Belanja Pegawai serta Rencana Mitigasi

Jenis Belanja	Uraian	Pagu	Realisasi s.d. 30-Sep-2025	Rencana Realisasi Triwulan IV	Total Realisasi	Estimasi Sisa Pagu/Pagu Minus
A	B	C	D	E	F (D + E)	G (C – F)
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	6.457.468.000	6.009.901.413	447.500.000	6.457.401.413	66.587
5112	Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri					
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara					
5114	Belanja Gaji Dokter PTT					
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS					

5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK					
5121	Belanja Honorarium					
5124	Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito					

Sampai dengan triwulan III tahun 2025, terdapat sisa pagu/pagu minus belanja pegawai sebesar Rp447.500.000,- dan diestimasikan sampai dengan akhir tahun 2025 terdapat sisa pagu/pagu minus belanja pegawai sebesar Rp66.587,-

c. Informasi Pagu Blokir

No.	Jenis Belanja	Pagu	Blokir Pagu
1	51		
2	52	6.409.906.000	1.541.542.000
3	53	426.577.000	29.250.000
4	dst		

Pada tahun 2025 terdapat pagu yang diblokir sebesar Rp3.073.937.000,- Sampai dengan triwulan III tahun 2025, terdapat pembukaan blokir sebesar Rp1.503.145.000,- sehingga menyisakan pagu yang masih diblokir sebesar Rp1.570.792.000,-

2. Informasi *Outstanding* Kontrak Signifikan

No.	Kode Satker	No. Kontrak	Uraian Kontrak	Tanggal Mulai	Tanggal Akhir	Nilai Kontrak	Realisasi	Sisa
1.	692893	WIM.13.IMI-IMI.2-PB.02.01-13140	Pengadaan Jasa Layanan Internet untuk Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta Jawa Tengah TA 2025	1 jan 2025	31 des 2025	67.804.800	50.853.600	16.951.200

Berdasarkan *outstanding* kontrak tersebut, sebanyak 1 kontrak diperkirakan dapat diselesaikan tepat waktu.

3. Informasi Progres Likuidasi K/L pada Kabinet Merah Putih

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta telah melakukan pengalihan aset dan kewajiban dengan ringkasan progres likuidasi sebagai berikut:

Progres Likuidasi Berdasarkan Mutasi Nilai Aset dan Kewajiban

Pos Neraca	Nilai Saldo 31 Desember 2024 (Audited)	Nilai Saldo 30 September 2025	Mutasi	% Progres Likuidasi
A	B	C	D (B - C)	E (D / B x 100%)
Aset				
- Aset Lancar	2.767.985.546	0	2.767.985.546	100%
- Aset Tetap	33.433.766.879	0	33.433.766.879	100%
- Properti Investasi				
- Piutang Jangka Panjang				
- Aset Lainnya	465.156.388	0	465.156.388	100%
Kewajiban				
- Kewajiban Jangka Pendek	1.992.711.147	0	1.992.711.147	100%
- Kewajiban Jangka Panjang				

B. Informasi Penting Lainnya

Tugas dan fungsi kementerian/ lembaga mengalami perubahan ketika terbentuk kabinet merah putih. Sistem administrasi dan pengelolaan negara terkena dampak langsung dari perubahan ini. Hal ini menyebabkan berbagai penyesuaian dalam pengelolaan keuangan termasuk dalam penyusunan laporan keuangan. Penyesuaian ini menyebabkan satker harus melakukan likuidasi untuk tutup buku, serah terima aset & kewajiban serta pertanggungjawaban anggaran. Kanim Surakarta telah menyelesaikan proses likuidasi sesuai dengan Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-106/PB.6/2025 hal Percepatan Pelaksanaan Likuidasi Kementerian/ Lembaga terdampak Pembentukan Kabinet Merah Putih.

C. Informasi Kinerja Triwulan III 2025

Kode	Kegiatan	Belanja			Output				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Targ et	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BF.6161	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah								
	-Layanan Penerbitan Dokumen Perjalanan RI	831.123.000	301.094.350	36,23	52,80	0	Orang	0	
	-Layanan Penerbitan Izin Tinggal	109.600.000	57.197.900	52,19	0	0	Orang	0	
	-Operasi Intelijen Keimigrasian di Wilayah	223.190.000	87.580.700	39,24	1.781	10	Operasi	50	
	-Operasi Mandiri di Wilayah	246.800.000	179.333.414	72,66	20	14	Operasi	58,33	
	-Operasi Gabungan di Wilayah	63.480.000	4.690.000	7,39	24	3	Operasi	100	
	-Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah	21.000.000	4.114.000	19,59	3	0	Operasi	0	
	-Tindakan Administratif Keimigrasian	125.540.000	25.014.125	19,93	1	5	Orang	55,55	
	-Pemeriksaan Keimigrasian di TPI	460.170.000	341.417.121	74,19	8	150	Orang	75	
	-Pengawasan Orang Asing	307.800.000	58.673.000	19,06	200	0	Orang	0	
					7				
BF.6163	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah								
	-Layanan BMN	4.896.000	1.632.000	33,33		0	Layanan	0	
	-Layanan Umum	181.064.000	94.318.889	52,09	1	0	Layanan	0	
	-Layanan Data & Informasi	390.575.000	210.772.224	53,96	1	0	Layanan	0	
	-Layanan Perkantoran	9.370.872.000	7.721.375.382	82,40	1	0	Layanan	0	
	-Layanan Sarana Internal	426.577.000	0	0	1	0	Unit	0	
	-Layanan Manajemen SDM	333.592.000	140.061.122	41,99	72	0	Layanan	0	
	-Layanan Perencanaan & Penganggaran	82.020.000	50.887.987	62,04	1	0	Layanan	0	
	-Layanan Manajemen Keuangan	152.410.000	74.220.888	48,70	1	0	Layanan	0	
	-layanan Reformasi Kinerja	119.362.000	54.220.868	45,43	1	0	layanan	0	
					1				
	Subtotal	13.450.071.000	9.406.603.970	69,93					
	Penyesuaian (Revisi DIPA/Pengembalian Belanja/dll.)*								
	Total	13.450.071.000	9.406.603.970	69,93					